

Daftar Bacaan

1. Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.
2. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan Hukum KUHP – Penyidikan dan Penuntutan . Ed. 2, Cet, 14*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 (selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap I), h. 35.dikunjungi pada tanggal 9 Desember 2018
3. Osman Simanjuntak, Teknik Penuntutan dan Upaya hukum, Kejaksaan Agung 1994, hal. 168
4. M. Yahya Harahap, Pembahasan dan permasalahan dan penerapan KUHP, Pemeriksaan siding pengadilan, Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.
5. iton Slamet Kurnia, Sri Harini Dwiyatmi dan Dyah Hapsari P, *Pendidikan Hukum, Ilmu hukum, dan Penelitian hukum di indonesia : Sebuah Reorientasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h. 129
6. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. 2009, h. 47
7. Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum : dalam Refleksi dan Rekontruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, h. 212

8. Soelistyowati Iriannto dan Shidarta, *Dalam Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, h. 142-149
9. Rizal, Jufrina dan Suhariyono AR, *DEMI KEADILAN : Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana : Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, h. 525
10. Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, *Buku Panduan Pendidikan Program Magister:Program Studi Ilmu Hukum*, Surabaya, 2016, h. 91
11. Made PasekDiantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 149

Daftar peraturan perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) Jo. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan

Berlakunya ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080).

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Tentang : Hak Asasi Manusia.
4. Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
6. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
7. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
8. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
9. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MEDIA ONLINE

1. Jimly Asshidiqi, “Penegakan Hukum”,  
[http://www.jimly.com/makalahnamafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalahnamafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), h,  
1, Di akses pada tanggal 12 Desember 2018
2. <https://tirto.id/kpk-tanggapi-maraknya-terpidana-korupsi-ajukan-pk-cN3R>.  
di akses pada hari sabtu bulan 9 tahun 2018
3. [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) di akses pada tanggal 12 desember 2018.